

**KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN ARRUM (AR-  
RAHN UNTUK USAHA MIKRO KECIL) PADA PERUM  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANGKINANG  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam ( S.EI )**



**DI SUSUN OLEH :**

**WIRDATUL JANNAH**  
**NIM: 10725000018**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1432 H/2011 M**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul **Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam**. Pembiayaan ARRUM merupakan skim pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha.

Latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana kelayakan nasabah dalam mengajukan pembiayaan ARRUM, pembiayaan ARRUM ini diberikan kepada nasabah dengan melihat kelayakan usaha nasabah. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) serta bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil).

Penelitian ini dilaksanakan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, yang berada di jalan Jend. Sudirman (Samping Bank Muamalat/ADB) Kec. Banginang Kab. Kampar. Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang yaitu Pimpinan, Kasir, Penaksir barang jaminan dan 25 responden yang diambil dari populasi nasabah Pembiayaan ARRUM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, dalam teknik ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan teori, komentar kemudian dianalisa.

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

pada Perum Pegadaian Syariah adalah dengan menganalisa kelayakan nasabah yaitu melengkapi prosedur permohonan pembiayaan ARRUM, melengkapi persyaratan pembiayaan ARRUM, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah yaitu BPKB motor/mobil. Pembiayaan ARRUM ini menggunakan akad pembiayaan *tarif ijarah* yang disesuaikan dengan harga pasar setempat.

Tujuan Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) yaitu untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun dalam kondisi yang produktif dan sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan. Dalam pembiayaan ARRUM yang diberikan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang kepada nasabah telah sesuai dengan prinsip syariah dan konsep Ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN SYARIAH BANGKINANG	
A. Sejarah Berdirinya Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang .....	13
B. Visi dan Misi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang .....	15
C. Budaya Perusahaan .....	17
D. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.....	17
E. Jenis Produk Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.....	24
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH .....	26
A. Pengertian Gadai .....	26
B. Landasan Hukum Gadai .....	31
C. Rukun dan Syarat .....	36

D. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah.....	41
E. Barang Yang Boleh Digadaikan dan Jaminan Gadai.....	44
F. Produk Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang .....	46
G. Pembiayaan ARRUM .....	48
H. Konsep Islam Tentang Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) .....	50
 BAB IV KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN ARRUM (RAHN UNTUK USAHA MIKRO) PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANGKINANG.....	
A. Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang .....	54
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang .....	78
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
 Daftar Pustaka	
Lampiran	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah dan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana untuk mencukupi kebutuhannya. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk keperluan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah Perum Pegadaian. Pada masa krisis Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. Peran dalam pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian, disamping memupuk keuntungan, selain itu juga sebagai penunjang kebijakan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 69.

Gadai dilihat dari sisi fiqh disebut Ar-Rahn suatu akad (perjanjian) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan hutang.

Firman Allah SWT:

وَلَوْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ  
 وَلَوْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ  
 وَلَوْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ  
 وَلَوْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ  
 وَلَوْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ لَئِنْ كُنْتَ فَاحِشًا لَفِشَ بِنُحْتٍ لَّكَ  
 ...

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>2</sup>

Secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang dalam dunia financial barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.<sup>3</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

لَقَدْ رَهْن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
 بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لَهَا لَهُ مِنْهُ شَعِيرًا ( )

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra ia berkata: Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan

<sup>2</sup>Depag RI, *Al-Qur'an da Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987), h. 49.

<sup>3</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), Cet. Ke-3, h. 314.

darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya”. (HR. Ibnu Majah).<sup>4</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah seperti gadai telah dibenarkan dalam Islam, hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjanjian gadai dengan orang Yahudi di kota Madinah dan dalam hadits ini juga dibolehkan bermuamalah dengan non-muslim yang disertai adanya jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Akad transaksi Islam dalam Pegadaian syariah berjalan atas dua akad, yaitu:

1. *Akad Rahn*, *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>5</sup>

Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang berdiri pada tanggal 8 Oktober 2008 yang mempunyai 3 bentuk unsur produk unggulan, yaitu:

---

<sup>4</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2006), Cet. 1, h. 423.

<sup>5</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Kritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 279.



### 1. GADAI Syariah

Yaitu skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

### 2. MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad *murabahah* dan *rahn*.

### 3. ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil)

Yaitu skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.<sup>6</sup>

Tiga bentuk produk ini merupakan produk unggulan dari Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, salah satu produk yang mendekatkan Pegadaian Syariah dengan nasabah adalah Pembiayaan Modal Usaha Syariah ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil yang langsung menyentuh dan membantu nasabah pengusaha mikro dan kecil untuk perluasan usahanya.

---

<sup>6</sup>Perum Pegadaian Syariah, *Brosur GADAI Syariah, MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Ibadi), ARRUM (A-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)*.

Manfaat produk ARRUM sangat dirasakan oleh masyarakat Bangkinang terutama nasabah mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan perluasan usaha, dari manfaat serta peran Pegadaian Syariah terhadap nasabah dalam membantu usaha maka Pegadaian Syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM untuk usaha Mikro kecil ini.

Kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM pada Pegadaian Syariah dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak pegadaian, jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan maka nasabah tersebut layak untuk diproses kembali oleh pihak pegadaian dengan melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan ARRUM.

Setelah melakukan peninjauan kembali oleh pihak pegadaian, disini juga terdapat bentuk-bentuk nasabah dalam pengajuan pembiayaan ARRUM yang tidak bisa diproses atau ditolak, bentuk nasabah tersebut memiliki kriteria yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan ARRUM pada Pegadaian Syariah Bangkinang, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek hukum mengenai legalitas usaha dari nasabah yang tidak memiliki surat izin usaha, kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari terjadi masalah sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2. Jaminan, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak atas nama nasabah itu sendiri.

3. KTP (Kartu Tanda Penduduk) bukan asli bertempat di wilayah Pegadaian Syariah.
4. Usaha belum lama berjalan, usaha nasabah ini juga dilihat dari aspek ekonominya, sehingga usaha tersebut layak untuk diberi pembiayaan ARRUM, minimal usaha sampai 1 tahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan masalah pokok di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk kelayakan nasabah dalam transaksi ARRUM yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dan mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap produk ARRUM yang ditawarkan tersebut.

Oleh karena itu, Penulis meneliti dengan judul: **“Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB.

1. Bagaimana Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama menjalani kuliah.
2. Memberikan informasi dalam bentuk karya ilmiah kepada masyarakat tentang Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (Samping Bank Muamalat/ADB) Kec. Banginang Kab. Kampar. Riau. Telp (0762) 21608. Adapun alasan penulis meneliti pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, yaitu

- a. Permasalahan tersebut belum pernah diteliti orang lain ditempat bersangkutan.
- b. Ingin mengetahui kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dan kesesuaiannya dengan tinjauan Ekonomi Islam.
- c. Penulis merasa tempat dilakukannya penelitian ini mudah dijangkau dan data-data dapat dikumpulkan dari narasumber atau informan melalui wawancara atau angket.

### **2. Subjek dan Objek**

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang yang memanfaatkan produk ARRUM.

- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pegadaian dan nasabah yang memanfaatkan produk Pembiayaan Modal Usaha Syariah ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil). Dari karyawan berjumlah 4 orang, sedangkan dari nasabah berjumlah 25 orang, karena dalam penelitian ini jumlah populasinya terjangkau maka seluruh populasi ini dijadikan sampel.

### 4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua macam:

#### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari Pimpinan, Karyawan dan Nasabah Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 5. Teknik dan Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Angket

Yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh para responden untuk mendapatkan data yang menguatkan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Yaitu Pengumpulan dokumen-dokumen dari Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang untuk melengkapi data-data dan informasi yang penulis perlukan.

6. Analisa Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah metode Deskriptif analitik, dalam teknik ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan teori, komentar kemudian dianalisa.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

b. Deskriptif

Yaitu dengan menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data informasi dan kemudian dikaitkan dengan teori-

teori dan konsep yang mendukung pembahasan sehingga hasilnya relevan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, Penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Gambaran Umum**

Terdiri dari: Sejarah berdirinya Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan dan Jenis Produk Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

### **BAB III : Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah**

Terdiri dari: Pengertian Gadai, Landasan Hukum Syariah, Rukun dan Syarat, Aspek Pendirian Pegadaian Syariah, Barang Yang Boleh Digadaikan dan Jaminan Gadai, Produk Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, Pembiayaan ARRUM.



**BAB IV : Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

Terdiri dari: Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dan Tinjauan Ekonomi Islam dalam Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Rahn Untuk Usaha Mikro) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN SYARIAH**

#### **CABANG BANGKINANG**

#### **A. Sejarah Berdirinya Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang berdiri pada tanggal 8 Oktober 2008 yang beralokasi di kota Bangkinang Kabupaten Kampar yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 95/LB.1.00/ 2009, tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang KANWIL II Pekanbaru.<sup>1</sup>

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian tentang pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bangkinang di KANWIL II Pekanbaru:

1. Menimbang dan menyatakan bahwa:
  - a. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagian konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam, maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen itu;
  - b. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh Tim kantor Wilayah II di Pekanbaru telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Kantor Cabang Pegadaian Syariah di Jl. Letnan A. Mutholib

---

<sup>1</sup>Arief Khusain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB

RT 01/04 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten  
Kampar Propinsi Riau;

- c. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian.<sup>2</sup>

2. Mengingat dan menyatakan bahwa:

- a. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian;
- b. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-74/MBU/2008 tanggl 28 April 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dan Anggota-anggota Direksi Perum Pegadaian;
- c. Keputusan Direksi PERUM Pegadaian No. 1480/SDM.200322/2008 Tanggal 11 Juni 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian.<sup>3</sup>

Adapun karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang terdiri dari:

- 1. Arief Khusain Pohan : Sebagai Pimpinan Cabang
- 2. Nunung Puspitasari : Sebagai Penaksir barang jaminan
- 3. Raudatul Aslamyah : Sebagai Kasir
- 4. Syafaruddin : Satpam
- 5. Rio Chandra : Satpam
- 6. Briptu. Murdan : Sebagai Penjaga keamanan (Polisi)<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, 2008

<sup>3</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, 2008

<sup>4</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB

## **B. Visi dan Misi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

Visi Perum Pegadaian Syariah yaitu menjadikan Pegadaian Syariah pada tahun 2013 menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan Mikro dan Kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Misi Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Membantu program Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>5</sup>

Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil,

---

<sup>5</sup>[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

yang bersifat produktif kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

- b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktik riba lainnya.
- c. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

### C. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau *mascot* dan *jargon* si “INTAN” yang bermakna:

1. Inovatif: beriniasiatif, kreatif, produktif, Berorientasi pada solusi
2. Nilai moral tinggi: Taat beribadah, Jujur dan berpikir positif
3. Terampil: Kompeten dibidangnya
4. Adi layanan: Peka dan sepat tanggap, empatik, santun dan ramah
5. Nuansa Citra: Memiliki *sense of belonging*, peduli nama baik perusahaan.

Makna yang terkandung dalam *mascot* si “INTAN” adalah kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses berates tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangannya itulah kemudian dia disebut berlian, karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian.<sup>7</sup>

### D. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

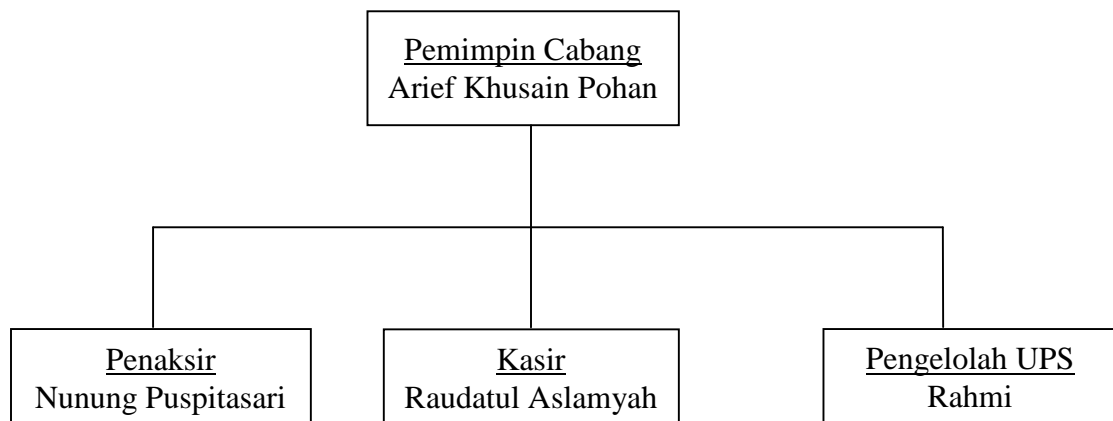
---

<sup>7</sup>[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

Perum pegadaian Syariah Cabang Bangkinang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. II. I

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang



**Sumber:** Dokumen Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian Cabang Perum Pegadaian Syariah Bangkinang adalah sebagai berikut:

### 1. Pemimpin Cabang

Pemimpin Cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:



**a. Tugas Pokok**

1. Mengurus rencana kerja dalam anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional *rahn*.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha.
4. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pembagian-pembagian tugas.
5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan dan penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu).
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan dan mengawasi barang jaminan.
7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelelangan konsumen.
9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penguasaan sarana dan prasarana.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
11. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.

12. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPS.<sup>8</sup>

**b. Tugas Tambahan**

1. Melaksanakan tugas pekerjaan *rahn* internal perusahaan.
2. Melaksanakan tugas pekerjaan *rahn* eksternal perusahaan.
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan.<sup>9</sup>

**c. Hubungan Kerja**

1. Dengan Direksi dalam hal tugas kerja.
2. Dengan Pemimpin Wilayah yang membina.
3. Dengan pemeriksa.
4. Dengan Pejabat/Pegawai bawahannya.
5. Dengan Inspektur wilayah.
6. Dengan Kantor Cabang Pegadaian Syariah lainnya dalam hal kegiatan dan sarana kerja.
7. Dengan Kantor Pusat dalam hal sarana kerja.
8. Dengan unit kerja lain perusahaan.
9. Dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan (bank dimana KCPS) tersebut membuka rekening, samsat, notaris dan kantong asuransi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 04 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB

<sup>9</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008.

<sup>10</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 04 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB

**d. Wewenang**

1. Menggunakan rencana kerja anggaran.
2. Menetapkan taksiran.
3. Mengelolah modal kerja.
4. Menandatangani cek bank.
5. Mengelolah barang jaminan.
6. Menugaskan bahwa untuk melakukan tugas lain selain kerja.
7. Menjatuhkan hukum disiplin sesuai kinerjanya.
8. Melakukan penilaian pegawai.
9. Membuat laporan kepada Pemwil tentang kendala pelaksanaan operasional KCPS.
10. Mewakili Direksi/Pemwil.<sup>11</sup>

**e. Tanggung Jawab**

1. Tersusun program kerja operasional Cabang Syariah dengan baik dan benar.
2. Tersalurkannya uang pinjaman, pengembalian uang kelebihan dan kewajiban pembiayaan lainnya dengan tepat dan akurat.
3. Terselenggarakannya lelang tepat dan akurat.
4. Terjalinnya hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat.
5. Terjaminnya barang jaminan nasabah secara utuh dan baik.
6. Terkoordinasinya, terlaksana dan terkontrolnya tugas pekerjaan dengan baik dan benar.

---

<sup>11</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

7. Terlaksananya promosi dan mutasi pejabat pegawai bawahan.
8. Tepatnya taksiran.
9. Terawatnya aktiva.
10. Terselenggaranya administrasi kantor dengan benar.
11. Tersampainya laporan penanggung jawaban tentang pekerjaan.
12. Tersampainya laporan pendukung operasional Kantor CPS.<sup>12</sup>

## 2. Penaksir

Fungsi: menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas:

- a. Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman.
- b. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan perhitungan kepada Pemimpin Cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*.
- d. Menetapkan biaya administrasi dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

## 3. Kasir

Fungsi: melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>12</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008.

<sup>13</sup>Nunung Puspitasari, Penaksir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, 14.00 WIB

Tugas:

- a. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.
- b. Menerima modal kerja harian dari atasan.
- c. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan penerimaan pelunasan *mahun bih* dan *mahun*.<sup>14</sup>.

#### **4. Pengelolah UPS**

Adapun tugas pengelolah UPS dapat dilihat sebagai berikut:

##### **a. Tugas Pokok**

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
3. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan keberhasilan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
5. Melaksanakan, penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dan dalam rangka menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.

---

<sup>14</sup>Raudatul Aslamyah, Kasir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, 14.00 WIB

6. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan (BJ) yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.<sup>15</sup>

**b. Tugas Tambahan**

1. Membantu menyelesaikan tugas pekerjaan administrasi.
2. Menjadi anggota panitia serah terima PCPS.
3. Mengerjakan tugas pekerjaan lain yang diberikan PCPS sesuai peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

**E. Jenis Produk Perum Pegadaian Syariah Bangkinang**

Produk Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang diantaranya:

**1. GADAI Syariah**

Yaitu skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.<sup>17</sup>

**2. MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)**

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran

---

<sup>15</sup>Rahmi, Pengelolah UPS Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 07 Juli 2011, 11.00 WIB

<sup>16</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

<sup>17</sup>Brosur Produk GADAI Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang

dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan Rahn.<sup>18</sup>

### 3. ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil)

Yaitu skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.<sup>19</sup>

### 4. Pegadaian Jasa Taksiran

Yaitu bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan usaha bisnis.<sup>20</sup>

### 5. Pegadaian Jasa Titipan

Yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki.<sup>21</sup>

### 6. Pegadaian Krista

Pegadaian Krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang kecil, tukang sayur, pedagang kaki lima) yang bergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Brosur Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang

<sup>19</sup>Brosur Produk ARRUM (A-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang

<sup>20</sup>Laporan Tahunan , *Pegadaian*, 2010, h. 24.

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 24.

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 24.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI SYARIAH

##### A. Pengertian Gadai

###### a. Gadai Menurut Etimologi

*Ar-rahnu* menurut bahasa ialah menahan sesuatu barang karena suatu sebab tertentu.<sup>1</sup> Kalimat *rahn* (gadai) itu menurut *lughat* artinya ‘tetap’. Ada yang mengatakan ‘menahan’.<sup>2</sup> *Rahn* berarti الثبوت والدوام (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti الحبس والزوم (pengekangan dan keharusan).<sup>3</sup>

###### b. Gadai Menurut Terminologi

Adapun gadai/*rahn* menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

*Ar-rahnu* menurut istilah perjanjian akad dengan jaminan suatu barang atau benda yang terjamin sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya<sup>4</sup>. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Abd. Madjid, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jawa Tengah: Garoeda Buana Indah, 1993), Cet. ke-4, h. 87.

<sup>2</sup> Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), Cet. ke-7, h. 584

<sup>3</sup> Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-1, h. 159

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 87.

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Cet. ke-1, h. 86.



Gadai Menurut Bank Indonesia (1999), adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.<sup>6</sup> Gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang.<sup>7</sup> Suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.<sup>8</sup>

*Ar-rah*n adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>9</sup>

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. ke-3, h. 28.

<sup>7</sup> A. Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 21.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. ke-27, h. 309

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 128.

<sup>10</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h. 271.

Gadai diadakan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak menjual barang tersebut, jika si berutang tidak sanggup atau tidak mampu membayar maka barang tersebut akan dilelang untuk menutupi utang si piutang, jika hasil penjualan barang gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihanannya itu harus dikembalikan kepada si penggadai.<sup>11</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>12</sup>

Perusahaan Umum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pinjaman untuk keperluan usaha maupun untuk pembiayaan lainnya dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat

---

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. ke-3, h. 81.

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-2, h. 201.

atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan yang mengandung unsur bunga yang berlipat ganda dan unsur riba.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahl*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai suatu bentuk kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.<sup>15</sup>

Adapun tujuan pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang.

---

<sup>13</sup>Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Edisi ke 5, h. 443.

<sup>14</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Edisi 2, 2004), h. 157.

<sup>15</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet Ke-6, h. 250.

3. Menyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan
5. Menunjang pelaksana kebijakan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai
6. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
  - a. Para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, industri kecil yang bersifat produktif
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah bersifat konsumtif.<sup>16</sup>

---

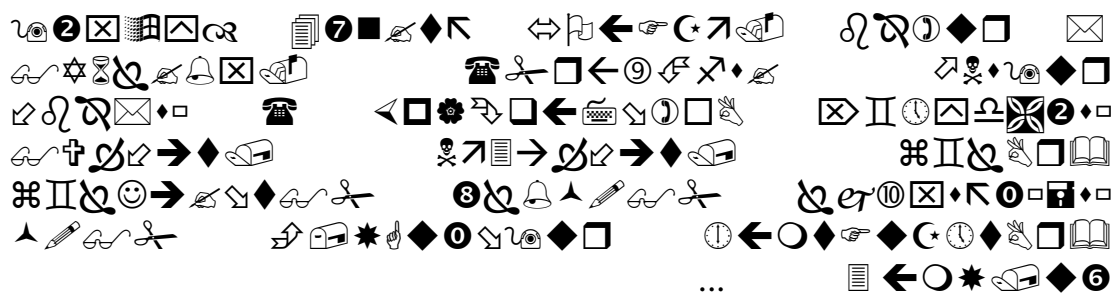
<sup>16</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1331.

## B. Landasan Hukum Gadai

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai syariah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW, Pandangan Ulama dan Fatwa DSN-MUI.

### a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS. Al-Baqarah ayat: 283)



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>17</sup>

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya

<sup>17</sup>Depag RI, *Al-Qur'an da Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987), h. 49.

(*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.<sup>18</sup>

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahaan transaksi *rahn*. Dan apabila sebagian kamu mempercayai yang lain maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.<sup>19</sup>

#### **b. Hadits**

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai Syariah adalah hadits Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

1. Hadits dari Anas bin Malik r.a, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

، : لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم د رعا عند يهودي بالمدينة  
فأخذ لاهله منه شعيرا ( )

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra ia berkata: Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah,

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), Cet. ke-1, h. 6.

<sup>19</sup>Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Tema Insani,1999), jilid 1, h. 469

dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya”.

(HR. Ibnu Majah).<sup>20</sup>

2. Hadits dari Aisyah r.a, yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل، ورهنه درعا من حديد (روه مسلم)

Artinya: “Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”. (HR. Muslim).<sup>21</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya dengan memperoleh makanan dari seorang Yahudi demi kebutuhan keluarganya dan ini merupakan studi dalil yang nyata bahwa suatu gadaian harus menggunakan harta atau jaminan yang bernilai dan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara orang musafir dengan orang yang menetap. Kebutuhan dana yang mendesak memudahkan masyarakat untuk memperoleh dana yang cepat dengan menggadaikan barang jaminan yang dimilikinya, aplikasi ini telah diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

### c. Pandangan Ulama

<sup>20</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 418.

<sup>21</sup>Muhammad Hasbinuddin al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1, h. 679.

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat bahwa perjanjian ini boleh dilakukan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun dalam keadaan perjalanan seperti dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat: 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>22</sup>

Asy-syafi'I menyatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang yang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada ditangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Asy-syafi'I yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.<sup>23</sup>

#### **d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)**

---

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. ke-4, h. 125.

<sup>23</sup>Heri Sudarsono, *op. cit.*, h. 159.



Hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan .
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>24</sup>

### C. Rukun dan Syarat

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

#### 1. Rukun Gadai

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai meliputi orang yang mengadaikan (*ar-rahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*), orang yang

---

<sup>24</sup>Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 113.

menerima gadai (*al-murtahin*). Nilai barang mendorong adanya gadai dan sifat akad gadai.<sup>25</sup>

Dalam fikih empat mashab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

**a. *Aqid* (Orang yang Berakad)**

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai ). Hal dimaksud didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).<sup>26</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

1. Telah dewasa;
2. Berakal;
3. Atas keinginan sendiri.
4. *Ma'quud' alaih* (Barang Yang Diakadkan).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid-3, Cet. ke-3, h. 192.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 20.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1, h. 91.

*Ma'qud alaih* meliputi 2 (dua) hal yaitu, *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>28</sup>

**b. *Al-Marhun* (Barang yang digadaikan)**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahn* (pemberi gadai) adalah:

1. Dapat diserahkan terimakan
2. Bermanfaat
3. Milik *rahn* (orang yang menggadaikan)
4. Jelas
5. Tidak bersatu dengan harta lain
6. Dikuasai oleh *rahn*
7. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>29</sup>

**c. *Al-Marhun bih* (Utang)**

Pinjaman yang diberikan kepada *rahn* atas dasar tafsiran *marhun*.

**d. *Sighat, Ijab dan Qabul***

Kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam bertransaksi.

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 20

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 92

## 2. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri atas:

### a. *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat di perpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

### b. Pihak- Pihak Yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat, dan mampu, melakukan akad.<sup>30</sup>

Menurut sebagian pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang *mumayyiz* untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang

---

<sup>30</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 31

yang telah *baligh* dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, melainkan cukup sudah berakal saja dan mendapat persetujuan dari walinya.

### c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa :

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; dan
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.<sup>31</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

1. Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
2. Marhun bih memungkinkan dapat dibayar
3. Hak atas marhun bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan syarat, yaitu:

1. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
2. Utang harus lazim pada waktu akad
3. Hutang harus jelas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 92.

<sup>32</sup>Rachmat Syafei, *op.cit.*, 163

**d. *Marhun***

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

1. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;
2. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai utang;
3. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
4. Agunan itu milik sah debitur;
5. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);
6. Agunan itu harus harta yang utuh; dan
7. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), Cet. ke-1, h. 21

#### **D. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah**

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian Pegadaian Syariah tersebut antara lain:

##### **1. Aspek Legalitas**

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah, sebagaimana peraturan pemerintah No 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM), pasal 3 ayat 1 a, menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 b, yang menyatakan pencegahan praktik ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legalitas bagi berdirinya Pegadaian Syariah.<sup>34</sup>

##### **2. Aspek Permodalan**

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk peminjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk menyimpan barang gadai, demikian juga operasional sehari-hari yang dikeluarkan oleh pegadaian itu sendiri. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa

---

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, h. 50.



orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).<sup>35</sup>

### 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberlangsungan Pegadaian Syariah sangat ditentukan oleh kemampuan SDM nya yang harus memahami sistem operasionalisasi gadai syariah. Kemampuan analisis mengenai investasi yang dapat mendatangkan hasil yang baik dan masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, terutama dalam melakukan penaksiran atas barang gadai.

### 4. Aspek Keuangan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam. Praktik gadai dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur-unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu setiap pelaksanaan operasional yang dilakukan dalam praktik gadai syariah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

### 5. Aspek Sistem dan Prosedur

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah sistem lembaga keuangan modern yang mengutamakan efesiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Oleh karena itu, semua sistem dan

---

<sup>35</sup>Heri Sudarsono, *op. cit*, h. 165.

prosedur yang dijalankan di Pegadaian Syariah bertujuan untuk memudahkan bagi para nasabah dalam mengakses perjanjian utang-piutang dengan pihak Cabang Pegadaian Syariah yang ada di seluruh Indonesia.<sup>36</sup>

#### 6. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu usaha perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena untuk menjaga-jaga agar supaya Pegadaian Syariah tetap melayani prinsip syariah, maka dari itu gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>37</sup>

### **E. Barang Yang Boleh Digadaikan dan Jaminan Gadai**

a. Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan barang jaminan pada prinsipnya adalah barang yang bergerak antara lain:

1. Barang atau benda-benda perhiasan diantaranya:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Intan
- d. Berlian
- e. Mutiara.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57.

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, *Op. cit*, h. 166.

<sup>38</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. ke-6, h. 251

2. Barang-barang yang berupa kendaraan seperti:

- a. Mobil.
- b. Sepeda motor.

3. Barang Elektronik seperti:

- a. Hp
- b. Televisi
- c. Laptop
- d. Kamera Digital.<sup>39</sup>

**b. Jaminan gadai**

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB.

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *op.cit*, h. 2.

Lembaga Pegadaian saat ini berbentuk suatu Perusahaan Umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat terjadinya hak gadai terdapat dua tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Tahap pertama, untuk terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminannya. Perjanjian ini bersifat konsesuil dan *obligatoir*.
- b. Tahap kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai, benda dijadikan objek gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitor atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitor, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaannya debitor.<sup>41</sup>

#### **F. Produk Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

Produk Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang diantaranya:

##### **1. GADAI Syariah**

Yaitu skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

##### **2. MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)**

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran

---

<sup>41</sup>*Ibid.* h. 32.

dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan Rahn.

### 3. ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil)

Yaitu skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.<sup>42</sup>

### 4. Pegadaian Jasa Taksiran

Yaitu bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan usaha bisnis.<sup>43</sup>

### 5. Pegadaian Jasa Titipan

Yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki.<sup>44</sup>

### 6. Pegadaian Krista

Pegadaian Krista ditujukan bagi pengusaha kelompok mikro (pedagang kecil, tukang sayur, pedagang kaki lima) yang bergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup>Perum Pegadaian Syariah, *Brosur GADAI Syariah, MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Ibadat), ARRUM (A-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)*.

<sup>43</sup>Laporan Tahunan, *Pegadaian*, 2010, h. 24.

<sup>44</sup>*Ibid.* h. 24.

<sup>45</sup>*Ibid.* h. 24.

## **G. Pembiayaan ARRUM**

Skim pembiayaan ini diberi nama ARRUM yang merupakan dari Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil, produk ini merupakan pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara gadai maupun fidusia. Skim ARRUM ini merupakan pinjaman kepada individual pengusaha mikro kecil.<sup>46</sup>

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.<sup>47</sup>

Usaha Kecil, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah suatu usaha produktif yang berskala kecil:

- a. Milik Warga Negara Indonesia
- b. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau berbadan hukum termasuk koperasi;
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

---

<sup>46</sup>[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

<sup>47</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

- d. Memiliki omzet usaha paling banyak Rp. 1 Milyar per tahun
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.<sup>48</sup>

Produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran disertai berupa jaminan BPKB motor dan mobil.<sup>49</sup>

Produk ARRUM hanya dapat digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal, selain daripada itu tidak dapat dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti: biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.<sup>50</sup> Tujuan Pegadaian Syariah menerbitkan produk ARRUM adalah untuk membantu para Pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun dalam kondisi yang produktif dan sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

<sup>49</sup> Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

<sup>50</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008.

<sup>51</sup>Arief Khusain Pohan, (Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang), wawancara, di Bangkinang, Selasa 21 Juni 2011, pukul 14.10 WIB.

## **H. Konsep Islam Tentang Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)**

Dalam pembahasan fikih, gadai dikenal dengan sebutan *rahn* yang secara harfiah berarti tetap atau langgeng, *rahn* adalah akad berupa penetapan suatu barang yang dijadikan pembayaran jika utang tersebut tidak dapat dilunasi.

Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Islam selalu menekankan ekonomi yang baik sebagai sarana mencapai tujuan dunia yang lebih besar, seperti pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah yang tidak hanya memupuk keuntungan tetapi juga untuk membantu nasabah Mikro dan kecil yang kekurangan dana dengan prinsip tolong menolong sehingga dari pembiayaan yang diberikan akan tercapai misi Pegadaian dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu kemasa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, terutama pembiayaan ARRUM (Ar-Rahan Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon nasabah (*rahin*), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Studi kelayakan nasabah ini dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai



kemampuan nasabah untuk dapat kedepannya membayar kewajiban dari pinjaman tersebut.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>52</sup> Mengenai kebolehan mengambil manfaat atau biaya-biaya terhadap perjanjian gadai dengan *rahn* berlandaskan hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب  
بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب  
ويشرب النفقة.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Rasulullah saw. Bersabda, " Binatang ternak yang digadaikan, saat digadaikan boleh dinaiki oleh pemberi hutang, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk mengurusnya. Dan ketika digadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi hutang, karena dengan biayanya pengurusan binatang tersebut. Orang yang

---

<sup>52</sup>Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 280.

menunggangi dan meminum susunya, harus membiayai pengurusannya". (HR. Al-Bukhari)<sup>53</sup>.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dari fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudaratn bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*)<sup>54</sup>.

Aspek syariah tidak hanya menentukan bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian Syariah, termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai *funder*-nya. Pegadaian syariah juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.

Usaha mikro dan kecil akan berkembang sejalan dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang mendukung para Pengusaha dalam menjalankan suatu usaha yang pada awalnya usaha mikro kecil mendapat kendala, yaitu kesulitan dalam

---

<sup>53</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Jilid. 2, Cet. ke-1, h. 183.

<sup>54</sup> Muhammad,. Sholikhul Hadi, *op. cit.*, h. 76.

kebutuhan dana, disinilah peran dari Lembaga Keuangan Syariah maupun lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan ARRUM kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal dengan suatu barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengamatan model ekonomi Islam yang terus menjadi agenda pengkajian terus menerus oleh ekonomi dan ulama untuk menemukan prinsip-prinsip berekonomi yang baik, demi kesejahteraan dan kebaikan hidup manusia. Pengembangan usaha Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Lainnya sangat penting untuk mendukung para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha dan terciptanya perekonomian Islami yang dapat meningkatkan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV

### KELAYAKAN NASABAH DALAM PENGAJUAN ARRUM (RAHN UNTUK USAHA MIKRO) PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANGKINANG

#### A. Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

Produk ARRUM merupakan pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan kontruksi penjaminan secara gadai dan fidusia.<sup>1</sup> Adapun bentuk aplikasi serta prosedur bertransaksi adalah sebagai berikut:

##### a. Prosedur Permohonan Pembiayaan ARRUM

1. Calon *rahin* mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM-1 melalui bagian Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.
2. Calon *rahin* menyerahkan formulir ARRUM yang telah diisi dengan melampirkan: Foto copy KTP calon *rahin* dan KTP suami istri serta kartu keluarga, menyerahkan keterangan domisili untuk calon *rahin* yang alamat berbeda dengan domisili usahanya, menyerahkan foto copy NPWP dan SPT tahun terakhir (bila ada).

---

<sup>1</sup>Pedoman Operasional Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, 2008.

Selanjutnya menyerahkan foto copy SIUP/HO/TDP/SITU/Izin Usaha Lainnya, menyerahkan foto copy rekening buku bank 3 bulan terakhir (bila ada), menyerahkan foto copy tagihan listrik, telpon, dan bukti bayar PBB terakhir, menyerahkan foto copy buku catatan keuangan dengan 6 bulan terakhir (bila ada), kemudian menyerahkan dokumen kepemilikan marhun yang diperlukan.

Tanggapan responden tentang prosedur dan persyaratan administrasi pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Tanggapan Responden Tentang Prosedur dan Persyaratan**  
**Administrasi Pembiayaan Produk ARRUM di Pegadaian**  
**Syariah Cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	Sangat mudah	22	88%
2	Mudah	3	12%
3	Sulit	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 22 nasabah (88%) menyatakan sangat mudah dalam prosedur dan persyaratan administrasi pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, dan 3 nasabah (12%) menyatakan mudah, di dalam tabel ini menunjukkan bahwa prosedur

pembiayaan ARRUM tidak menyulitkan nasabah tetapi memudahkan nasabah ketika nasabah membutuhkan penambahan modal dengan cepat.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang nasabah pengusaha mikro menyatakan bahwa prosedur pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang tidak berbelit-belit, apabila persyaratan pembiayaan ARRUM telah lengkap maka dana pembiayaan akan dapat segera dicairkan.<sup>2</sup>

3. Bersama Pegawai Fungsional ARRUM melakukan peninjauan lokasi usaha.<sup>3</sup>

Dalam peninjauan lokasi usaha ini, hasil wawancara penulis dengan nasabah, bahwa setelah nasabah melengkapi prosedur dan persyaratan pembiayaan ARRUM, peninjauan lokasi dilaksanakan dua hari setelah melengkapi formulir pembiayaan ARRUM.<sup>4</sup>

#### **b. Langkah-langkah dalam Analisis Kelayakan Usaha Nasabah**

1. Pegawai Fungsional ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, melakukan penelitian sebagai berikut:

Apakah calon *rahin* adalah pengusaha mikro atau kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai marhun sebagai objek jaminan pinjaman dengan memeriksa buku catatan keuangan usahanya. Jika jawaban calon *rahin* “ya”, maka selanjutnya ditanyakan: apakah status

---

<sup>2</sup>Edy Sukri, nasabah Pembiayaan ARRUM Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang , *wawancara* , 8 agustus 2011, 11.30 WIB.

<sup>3</sup>Nunung Puspitasari, Penaksir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, *wawancara*, Bangkinang, 14 September 2011, 11.20 WIB

<sup>4</sup>Roni Rahmat, Nasabah Pembiayaan ARRUM Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, *Wawancara*, Bangkinang 8 Agustus 2011, 11.13. WIB

usaha calon *rahin* sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Untuk itu Pegawai Fungsional ARRUM meminta calon *rahin* menunjukkan SIUP/HO/TDP/SITU/Izin Usaha Lainnya dengan mencocokkan Akta pendiriannya.<sup>5</sup>

Jika jawaban diatas juga “ya”, maka selanjutnya ditanyakan: sejak kapan usahanya berdiri, dengan meminta calon *rahin* menunjukkan Akta pendirian usaha atau dokumen yang sah. Selanjutnya Pegawai Fungsional ARRUM menanyakan tentang jenis usaha kemudian mencocokkan dengan daftar jenis usaha yang dilarang dalam Islam. Kemudian Pegawai Fungsional ARRUM memeriksa marhun untuk melihat apakah *marhun* yang diajukan memenuhi syarat atau tidak serta menentukan taksiran marhun tersebut.<sup>6</sup>

Apabila langkah-langkah di atas calon *rahin* masih memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan diminta meng-*copy* dokumen yang diperlukan dan melengkapi persyaratan lainnya.<sup>7</sup>

Pegawai Fungsional ARRUM melakukan penggalian informasi lapangan dengan jalan peninjauan lokasi/domisili usaha calon *rahin* untuk memeriksa lokasi usaha, yaitu melihat daerah lokasi tersebut tidak terlarang atau tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan

---

<sup>5</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008.

<sup>6</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

<sup>7</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 04 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB.

masyarakat, aktivitas usaha berjalan baik atau tidak dan melakukan wawancara dengan orang-orang atau tetangga calon *rajin* dan analisis terhadap dokumen pengajuan pinjaman.<sup>8</sup>

Peninjauan lokasi usaha (*survey* lapangan) dapat diketahui melalui tanggapan responden tentang adanya peninjauan lokasi usaha yang dilakukan oleh Pegawai Fungsional ARRUM, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini:

**Tabel IV.2**  
**Tanggapan Responden Tentang Adanya Peninjauan Lokasi Usaha**  
**Dalam Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang**  
**Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1.	Ya	25	100%
2.	Tidak	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang adanya peninjauan lokasi usaha, aktivitas usaha oleh Pegawai Fungsional ARRUM terhadap nasabah, keseluruhan responden sebanyak 25 nasabah (100%) menyatakan mengetahui adanya peninjauan terhadap lokasi usaha.

Selanjutnya Pegawai Fungsional ARRUM melakukan pengecekan ke Polres setempat untuk cek fisik keabsahan BPKB. Membuat resume hasil analisis pinjaman dengan menggunakan formulir ARRUM-2, dan

---

<sup>8</sup>Nunung Puspitasari, Penaksir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, 14.00 WIB.



terakhir mengajukan persetujuan pinjaman kepada Manajer CPS dengan melengkapi draft akad pembiayaan ARRUM. (Form ARRUM-3).<sup>9</sup>

2. Manajer CPS, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembiayaan ARRUM terhadap calon *rahin*, yaitu sebagai berikut:

Memeriksa dokumen pengajuan pinjaman, lakukan audit calon *rahin* ke lapangan dengan cara *cross-check* secara acak setidaknya 40 % dari jumlah *rahin* yang mengajukan pinjaman.

Atas dasar hasil analisis kelayakan usaha dan taksiran *marhun* yang dilakukan Pegawai fungsional ARRUM, manajer CPS membuat nota persetujuan pinjaman dan menandatangani Formulir ARRUM-2.<sup>10</sup>

**c. Persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan ARRUM pada Perum Pegadaian Cabang Bangkinang**

1. Calon *Rahin* yaitu pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan bermotor, berupa BPKB (motor/mobil) sebagai obyek jaminan pinjaman (*marhun*).

Sesuai dengan persyaratan pembiayaan ARRUM di atas, maka untuk mengetahui jenis usaha nasabah pembiayaan ARRUM dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut:

---

<sup>9</sup>Nunung Puspitasari, Penaksir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 06 Juli 2011, 14.00 WIB

<sup>10</sup>Arief Khusain Pohan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB.

**Tabel IV.3**  
**Tanggapan Responden Tentang Jenis Usaha**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Angka</b>	<b>Persen</b>
1	Usaha Kecil	10	40%
2	Usaha Mikro	15	60%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 10 nasabah (40%) yang menyatakan usaha kecil dan 15 nasabah (60%) sebagai pengusaha mikro. Kriteria usaha nasabah sangat ditentukan dalam pembiayaan ARRUM yaitu tidak terlepas dari usaha mikro dan kecil, tujuannya untuk pengembangan usaha atau penambahan modal usaha nasabah. Dan untuk mengetahui obyek jaminan yang digunakan nasabah ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.4**  
**Tanggapan Responden Tentang Jenis Jaminan Pembiayaan**  
**(*Marhun*) Berupa BPKB (motor/mobil)**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Angka</b>	<b>Persen</b>
1	BPKB Mobil	10	40%
2	BPKB Motor	15	60%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 10 nasabah (40%) yang menyatakan memiliki jaminan pembiayaan (*marhun*) berupa BPKB Mobil dan 15 nasabah (60%) yang menyatakan BPKB motor atau kendaraan roda dua.

2. Calon *Rahin* tidak sedang menjadi nasabah kredit KREASI di Cabang Pegadaian Konvensional dan tidak sedang menjadi *Rahin* ARRUM di Cabang Pegadaian Syariah lainnya.<sup>11</sup>

Dalam produk pembiayaan ARRUM ini nasabah tidak boleh menjadi nasabah pembiayaan/kredit lainnya selain di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang karena sebagai upaya untuk menghindari risiko ketidaksanggupan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah berlangsung di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang. Calon *Rahin* bukan dari tugas pengelola ARRUM itu sendiri (Fungsional KUMK/Manajer Cabang) maupun orang lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.<sup>12</sup>

3. Identitas calon *rahin* yang jelas, yaitu:
  - a. WNI, dibuktikan dengan foto copy KTP serta menunjukkan yang aslinya dari daerah setempat.
  - b. Memiliki tempat tinggal yang tetap yang masih dalam radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara ARRUM, yaitu jarak maksimum antara tempat tinggal Rahin dengan Kantor CPS kurang lebih 15 Km. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon *rahin* harap menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan.

---

<sup>11</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, Dokumentasi, 2008

<sup>12</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 04 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB.

- c. Memiliki jiwa wirausaha serta yang kuat menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan pengalaman menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun.
4. Status usaha calon *Rahin* adalah usaha perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pembiayaan hanya bisa diberikan kepada individu pengusaha/badan hukum yang lolos uji analisis kelayakan usaha.<sup>13</sup>

Di dalam pembiayaan ARRUM pada Pegadaian syariah, nasabah harus memiliki Surat Izin Usaha, maka untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai Surat Izin Usaha tersebut dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut:

**Tabel IV.5**  
**Tanggapan Responden Tentang Akta Pendirian/Surat Izin Usaha**  
**Dari Usahanya**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	Ya	25	100%
2	Tidak	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 25 nasabah (100%) atau keseluruhan nasabah yang menyatakan Ya telah memiliki Akta Pendirian/Surat Izin Usaha. Yang terdiri dari pengusaha mikro dan kecil. Akta Pendirian Usaha sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan

---

<sup>13</sup>Arief Khushain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 04 Juli 2011, Pukul 14.10 WIB.

pembiayaan ARRUM yang tujuannya agar status usaha yang dimiliki nasabah jelas dan sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

5. Usia usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu syarat pembiayaan ARRUM yaitu melihat usia usaha nasabah tersebut yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, dan untuk melihat berapa lama usaha nasabah telah berjalan dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini:

**Tabel IV.6**  
**Lama Usaha Responden Telah Berjalan**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	1 tahun	2	8%
2	2 tahun	13	52%
3	3 tahun	7	28%
4	4 tahun	3	12%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa 2 nasabah (8%) dari pengusaha mikro menyatakan 1 tahun, 13 nasabah (52%) dari pengusaha mikro menyatakan 2 tahun, selanjutnya 7 nasabah (28%) dari pengusaha kecil menyatakan 3 tahun dan 3 nasabah (12%) pengusaha kecil yang menyatakan 4 tahun. Data dari tanggapan responden pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan usaha nasabah telah berjalan lebih dari satu tahun.

6. Jenis usaha tidak termasuk yang dilarang syariat Islam;
7. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila tempat usaha tersebut merupakan “tempat usaha terpadu” maka setiap calon *Rahin* yang berusaha di tempat tersebut dapat diberikan ARRUM asalkan memenuhi persyaratan lainnya;
8. Menyerahkan foto copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya (jika ada);
9. Menyerahkan foto copy SIUP/HO/TDP/SITU/izin usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya;
10. Menyerahkan foto copy rekening buku bank 3 bulan terakhir (jika ada);
11. Menyerahkan foto copy rekening tagihan telepon/listrik/buti pembayaran PBB yang terakhir. Cocokkan nama dan alamat dalam rekening tagihan pembayaran telepon/listrik/PBB dengan KTP/Surat Domisili;
12. Menyerahkan foto copy catatan keuangan 6 bulan terakhir (bila ada);
13. Menyerahkan dokumen kepemilikan marhun yang diperlukan;
14. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan Petugas Fungsional ARRUM;
15. Mengisi dan menandatangani aplikasi ARRUM;
16. Menandatangani akad Pembiayaan ARRUM yang diketahui oleh suami/istri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Dokumen Pegadaian Syariah, 2008.

Bagi nasabah yang menggunakan produk ARRUM akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan *tarif ijarah* atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* dengan *murtahin* (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan.<sup>15</sup>

**d. Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)**

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak Pegadaian terlebih dahulu harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan tersebut disalurkan, misalnya penilaian terhadap calon nasabah (*rahin*) itu sendiri.<sup>16</sup>

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif meliputi aspek-aspek:

**1. Karakter (*Character*)**

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang

---

<sup>15</sup> Arief Khusain Pohan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, *wawancara*, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB.

<sup>16</sup> Arief Khusain Pohan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, *wawancara*, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB

bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>17</sup>

## 2. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik, mampu dalam melunasi hutangnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materil, yaitu melakukan penilaian terhadap pendapatan usaha dari beberapa tahun terakhir.<sup>18</sup>

## 3. Modal (*Capital*)

Dalam hal ini pihak yang akan memberikan pinjaman terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, penelitian ini tidaklah semata-mata didasarkan pada kecil dan besarnya modal akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan dengan efektif.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. ke-6, h. 104.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 104

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 104



#### 4. Agunan (*Collateral/Rahn*)

*Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.<sup>20</sup>

#### 5. Kondisi (*Condition*)

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali dimasa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari *post performance*, tetapi juga evaluasi terhadap kondisi yang akan datang.<sup>21</sup>

Penilaian kelayakan usaha calon *rahin* dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon *rahin* dan seberapa besar kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman berikut dengan kewajiban ijarohnya. Penilaian kelayakan usaha ini, disamping dilakukan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon *rahin* dan Pihak Pegadaian meninjau langsung ke lokasi usaha calon *rahin*.

Penilaian ini mutlak dilakukan untuk menggali informasi tentang karakter calon *rahin* dan data-data keuangannya (Neraca, Laba Rugi dan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 104

<sup>21</sup>Arief Khusain Pohan, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 26 April 2011, Pukul 10.35 WIB.

kebutuhan modal kerja/investasi) dikaitkan dengan *Repayment Capacity* (RPC) dari calon *rahin* tersebut.<sup>22</sup>

**e. Jaminan Pembiayaan ARRUM (*Marhun*)**

Marhun dalam pembiayaan ARRUM merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antar Manajer Cabang Pegadaian Syariah selaku penyalur dengan pengusaha mikro-kecil selaku penerima pembiayaan (*rahin*). Objek jaminan pembiayaan dibatasi hanya kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi syarat:

1. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP;
2. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyatakan surat persetujuan menjamin kendaraan dari pemilik kepada Perum Pegadaian Syariah;
3. Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit, yaitu kendaraan dengan spesifikasinya sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Buku Pedoman Operasional Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil (ARRUM) Perum Pegadaian Syariah, 2008.

**Tabel IV.7**  
**Merk/Jenis Jaminan Mobil dan Motor**  
**(Marhun) Pembiayaan ARRUM Pada Pegadaian Syariah Cabang**  
**Bangkinang**

<b>Negara Pembuat</b>	<b>Tahun Pembuatan</b>	<b>Merk/Jenis</b>
Jepang	15 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%  5 tahun terakhir dengan kondisi fisik > 75%	Merk: Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Jenis: Model van, pickup, sedan dan jeep.  Sepeda Motor dengan Merk: Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.
Eropa	10 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Merk: BMW, Mercedes-Benz, Opel, Audi, Jaguar, Peugeot, Volvo, VW. Jenis: Model van, pickup, sedan dan jeep.
Korea	10 tahun terakhir dengan kondisi fisik >75%	Merk: KIA, Hyundai dan Daewoo Jenis: Model van, pickup, sedan dan jeep.

**Sumber:** Dokumen Pegadaian Syariah, 2008

4. Berplat nomor Polres/Polda setempat;
5. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, supaya dilakukan proses blokir BPKB atas biaya *Rahin*;
6. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain itu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dengan surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya setempat yang masih berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, 2008.

Cara penaksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan barang nasabah adalah barang tersebut dilihat dari kondisi serta tahun pemakaian, seperti yang telah dicantumkan tentang spesifikasi objek jaminan ARRUM sebelumnya. Setelah Penaksir menentukan harga barang jaminan tersebut dengan disesuaikan harga pasar setempat dan administrasi sesuai dengan jaminan barang (*marhun*), seperti tabel IV.8 dibawah ini:

**Tabel IV.8**  
**Biaya Administrasi Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah**  
**Cabang Bangkinang**

<b>Jenis Jaminan (Marhun)</b>	<b>Biaya Administrasi (Rp)</b>
BPKB Mobil	Rp. 200.000,-
BPKB Motor	Rp. 70.000,-

**Sumber:** Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang 2008/2011

Contoh simulasi ARRUM:

Seorang nasabah memiliki 1 buah mobil Kijang LGX tahun 2000 dengan taksiran harga pasar Rp 70.000.000.

Jadi pinjaman yang dapat diterima:

$$\text{Rp } 70.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 49.000.000$$

Biaya administrasi: Rp. 200.000

Ijarah:

$$\frac{\text{Rp } 70.000.000}{\text{Rp } 100.000} \times \text{Rp } 700 = 490.000/\text{bulan}$$

Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa nilai taksiran barang jaminan pembiayaan nasabah sebesar Rp. 70.000.000. sedangkan pembiayaan yang dapat diberikan oleh nasabah 70% dari nilai taksiran. Jadi pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah sebesar Rp. 49.000.000 dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 yang dibayar pada awal transaksi. Sedangkan penentuan ijarah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dari Rp. 70.000.000 : 100.000 x 700 = 490.000. jadi ijarah yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 490.000/bulan dan ditambah dengan angsuran pinjaman yang telah disepakati.<sup>24</sup>

#### **f. Jangka Waktu Pembiayaan ARRUM**

Jangka waktu pembiayaan ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Atas terjadinya pembiayaan ini, *Rahin* dikenakan ijarah untuk selama jangka waktu pembiayaan.<sup>25</sup>

Proses jangka waktu pencairan dana pembiayaan ARRUM terhadap nasabah yaitu tergantung dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, apabila nasabah tersebut telah melengkapi sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan oleh Perum Pegadaian, maka pihak Pegadaian melakukan proses

---

<sup>24</sup>Nunung Puspitasari, Penaksir Barang Jaminan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, *wawancara*, Bangkinang, 5 Agustus 2011, 14.30 WIB.

<sup>25</sup>Pedoman Operasional Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, 2008

pengajuan pembiayaan nasabah dalam jangka waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari kemudian pencairan dana dapat dilakukan.<sup>26</sup>

Berikut ini Penulis uraikan tanggapan responden untuk melihat berapa lama waktu pencairan dan pembiayaan produk ARRUM di Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang akan dilihat dengan tabel di bawah ini:

**Tabel IV.9**  
**Tanggapan Responden Tentang Jangka Waktu Pencairan Dana**  
**Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	3 hari	21	84%
2	4 hari	2	8%
3	5 hari	2	8%
4	6 hari	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 21 nasabah (84%) nasabah yang menyatakan bahwa jangka waktu pencairan dana pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang selama 3 hari, dan 2 nasabah (8%) nasabah yang menyatakan 4 hari. Dan 2 nasabah (8%) yang menyatakan 5 hari.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden mengenai alasan memilih produk ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut ini:

---

<sup>26</sup>Raudatul Islamyah, Kasir Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 5 Agustus 2011, 15.10 WIB.

**Tabel IV.10**  
**Alasan Responden Memilih Produk ARRUM di Pegadaian Syariah**  
**Cabang Bangkinang**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Angka</b>	<b>Persen</b>
1	Untuk memperluas usaha	18	72%
2	Untuk penambahan modal	7	28%
3	Untuk konsumsi	0	0%
4	Untuk pembiayaan hidup	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel tersebut, menjelaskan bahwa 18 nasabah (72%) yang menyatakan memilih produk pembiayaan ARRUM untuk memperluas usaha, dan 7 nasabah (28%) memilih produk pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang untuk penambahan modal.

Berdasarkan data dari tanggapan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan ARRUM telah memberikan manfaat bagi nasabah, yaitu untuk memperluas usaha dan untuk menambah modal dari usaha yang sedang berjalan. Seperti wawancara Penulis dengan nasabah pengusaha kecil yaitu Bapak Arizal yang menyatakan manfaat dari pembiayaan ARRUM yaitu untuk memperluas usahanya.<sup>27</sup> Pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan pembiayaan ARRUM ini diharapkan terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik dalam perekonomian keluarga dan masyarakat disekitarnya.

---

<sup>27</sup>Arizal, S.T, Nasabah Pembiayaan ARRUM Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang 10 Agustus 2011, 11.13. WIB.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pelayanan di dalam produk ARRUM pada Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut ini:

**Tabel IV.11**  
**Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan Di Dalam Produk ARRUM**  
**Pada Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

<b>No</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Angka</b>	<b>Persen</b>
1	Sangat memuaskan	7	28%
2	Memuaskan	16	64%
3	Cukup memuaskan	2	8%
4	Kurang memuaskan	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 7 nasabah (28%) yang menyatakan sangat memuaskan, 16 nasabah (64%) yang menyatakan memuaskan dalam pelayanan produk ARRUM yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, dan 2 nasabah (8%) yang menyatakan cukup memuaskan. Data yang diperoleh dari tabel ini menunjukkan sistem pelayanan yang diberikan pihak Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap nasabah pembiayaan ARRUM.

Dan untuk mengetahui berapa lama nasabah memanfaatkan fasilitas pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut ini:



**Tabel IV.12**  
**Tanggapan Responden Tentang Jangka Waktu Memanfaatkan**  
**Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	1 tahun	20	80%
2	2 tahun	3	12%
3	3 tahun	2	8%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa 20 nasabah (80%) 1 tahun dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, dan 3 nasabah (12%) 2 tahun dan 2 nasabah (8%) menyatakan 3 tahun dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang.

Dan mengenai tanggapan responden apakah pernah terlambat dalam mengangsur pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dapat dilihat pada tabel IV. 13 berikut:

**Tabel IV.13**  
**Tanggapan Responden Tentang Keterlambatan Dalam Mengangsur**  
**Pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	Pernah	5	20%
2	Tidak Pernah	20	80%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan 5 nasabah (20%) pengusaha mikro yang menyatakan pernah terlambat dalam mengangsur pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang menjelaskan bahwa 20 nasabah

(80%) pengusaha mikro dan kecil yang menyatakan tidak pernah. Nasabah terlambat membayar angsuran yang melewati tanggal jatuh tempo maka nasabah tersebut dikenakan *Ta'widh* sesuai tarif yang ditetapkan surat edaran tersendiri.<sup>28</sup>

Untuk melihat apakah responden merasa berat dalam pengembalian pinjaman ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut ini:

**Tabel IV.14**  
**Tanggapan Responden Dalam Pengembalian Pinjaman ARRUM di**  
**Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	Berat	0	0%
2	Tidak Berat	25	100%
3	Sangat berat	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas, menjelaskan keseluruhan nasabah yaitu 25 nasabah (100%) menyatakan tidak berat dalam mengembalikan pinjaman ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, disini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ARRUM yang diberikan sesuai dengan kapasitas usaha nasabah dan juga dilihat dari barang jaminan (*marhun*) sehingga tidak menyulitkan nasabah tersebut dalam pengembalian pinjaman ARRUM dengan *tarif ijarah* yang terjangkau oleh nasabah tersebut, seperti tanggapan Ibu Nurmayti yang menyatakan tidak memberatkannya dalam pengembalian pembiayaan

---

<sup>28</sup>Arief Khusain Pohan, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 2 Agustus 2011, 13.20 WIB.

ARRUM karena tariff ijarah yang ditetapkan Pegadaian Syariah sangat terjangkau yaitu 1% dari nilai angsuran perbulannya.<sup>29</sup> Setiap produk yang diberikan Pegadaian Syariah tentunya mempunyai manfaat bagi nasabah, maka untuk melihat tanggapan nasabah terhadap manfaat pembiayaan ARRUM dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut:

**Tabel IV.15**  
**Tanggapan Responden Terhadap Manfaat Pembiayaan ARRUM yang**  
**diberikan oleh Pegadaian Syariah cabang Bangkinang**

No	Jawaban	Angka	Persen
1	Sangat bermanfaat	16	84%
2	Cukup bermanfaat	9	36%
3	Kurang bermanfaat	0	0%
4	Tidak bermanfaat	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa ada 16 nasabah (84%) yang menyatakan sangat bermanfaat dan 9 nasabah (36%) yang menyatakan cukup bermanfaat, dari hasil wawancara Penulis dengan salah satu nasabah, pinjaman pembiayaan ARRUM yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang telah memberikan kemudahan dan bantuan yang cukup untuk penambahan modal, disini juga diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang terus meningkatkan lagi dalam pemberian pembiayaan ARRUM agar lebih maju dan meningkatkan ekonomi rakyat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Nurmayti, Nasabah Pembiayaan ARRUM Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang 7 Agustus 2011, 11.13. WIB.

<sup>30</sup>Rifandi, Nasabah Pembiayaan ARRUM Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, wawancara, Bangkinang 11 Agustus 2011, 11.13. WIB.

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah telah mengeluarkan produk-produk yang berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dari berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah menggunakan akad pembiayaan *tarif ijarah*, akad yang dilakukan dengan menaksir jaminan pembiayaan nasabah, setelah diketahui nilai jaminan nasabah kemudian disesuaikan dengan harga pasar maka *ijarah* dapat ditentukan oleh Pegadaian Syariah untuk menjadi kewajiban berikutnya bagi nasabah. Pelaksanaan *tarif ijarah* dalam pembiayaan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang ini telah sesuai dengan Ekonomi Islam, yaitu dalam

---

<sup>31</sup>Sigit Triandaru, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 223.

pengambilan *ijarah* berdasarkan jasa simpanan dihitung nilai barang berdasarkan taksiran.<sup>32</sup>

ARRUM merupakan singkatan dari Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah. Untuk memperoleh pembiayaan ARRUM ini calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah dicantumkan Penulis halaman, apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
2. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
3. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
4. Petugas Pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
5. Penandatanganan akad pembiayaan
6. Pencairan pembiayaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h, 121.

<sup>33</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada group, 2010), Cet. Ke-2, h. 400.

Dari analisis kelayakan nasabah yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah sebelum melakukan akad pembiayaan ARRUM dengan nasabah, telah sesuai dengan konsep Islam dan hukum gadai syariah untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang Rahn yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperhatikan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan .
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>34</sup>

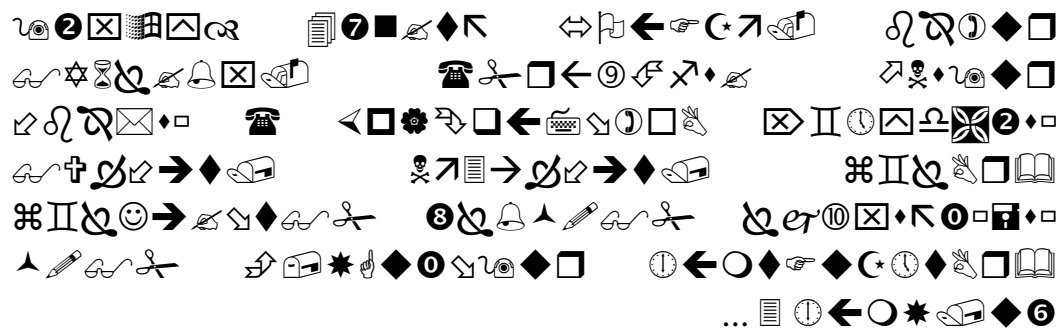
Islam memberikan jalan keluar bagi yang berkesulitan, sedang ia mempunyai suatu barang berharga dapat dijadikan jaminan, pada hakikatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang yang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang bergerak (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong diantara sesama dalam batas-batas pemberian jaminan.

---

<sup>34</sup>Abdul Ghofur Anshori. *Op cit.*, h, 113.

Aspek pengawasan dalam suatu perusahaan gadai syariah amat penting, karena di dalamnya terkandung pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu, organ pengawasan internal perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan pelaksanaan amanah. Tanggung jawab organ pengawasan, termasuk para pimpinan unit, tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak. Termasuk dalam organ pengawasan adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas para ulama.<sup>35</sup>

Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”<sup>36</sup> (QS. Al-Baqarah: 283)

Muslim secara konstan diingatkan akan nilai penting kesepakatan kontraktualnya, didalam pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah telah

<sup>35</sup>Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 73.

<sup>36</sup>Depag RI, *Al-Qur'an da Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987), h. 49.



tercantum akad-akad awal sebelum perjanjian ARRUM dilakukan antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”.

(QS. al-Maidah: 1).<sup>37</sup>

Orang muslim adalah orang yang memenuhi janji mereka, Al-Qur'an menganjurkan kaum muslim untuk menulis dan mengundang saksi dalam menyusun perjanjian yang mereka lakukan. Tujuan pendokumentasian kontrak adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau ambigius berkaitan dengan tanggung jawab berbagai pihak dalam kontrak tersebut, hal ini juga untuk memastikan semua pihak didalam kontrak tersebut memiliki pengetahuan yang penuh tentang apa yang telah mereka lakukan dan tanggung jawab yang diharapkan dari mereka sendiri.

Hadits Rasulullah SAW, telah menjelaskan tentang penerapan gadai sebelumnya, yaitu:

، : لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم د رعا عند يهودي بالمدينة  
خذ لاهله منه شعيرا ( )

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra ia berkata: Rasulullah saw pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan

<sup>37</sup> Ibid, h. 106

darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya”. (HR.

Ibnu Majah)<sup>38</sup>

Dan hadits Rasulullah SAW tentang barang gadai yang tidak bisa disembunyikan, yaitu:

حدثنا محمد بن حميد, حدثنا إبراهيم بن المختار, عن سعيد

بن المسيب, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يغلق

الرهن))

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Bin Hamid, meriwayatkan kepada kami Ibrahim Muktar, dari Sihak Bin Rashid, Dari Sa’id Bin Musaiyib, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda “ barang gadai tidak boleh disembunyikan” (H.R. Ibn Majah).<sup>39</sup>

Analisis kelayakan terhadap nasabah sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidaknya diberikan pembiayaan ARRUM sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dirugikan atas kedua belah pihak kedepannya. Kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang terhadap nasabah, jika ditinjau menurut Ekonomi Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan unsur yang diharamkan seperti *gharar*, *maisir*, *riba* dan

---

<sup>38</sup>Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2006), Cet. 1, h. 423.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 423.

saling suka sama suka diantara kedua belah pihak terhadap transaksi yang disepakati oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah.

Para fuqaha sering kali menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa sistem *muamalah* (transaksi) Islam sangat jelas adalah karena sistem tersebut didasarkan kepada prinsip kontrak yang solid dan juga berdasarkan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam akad pembiayaan yang dilakukan.<sup>40</sup>

Islam membenarkan praktik Pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Transaksi akad dalam Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak dalam perjanjian gadai. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama tentang akad gadai, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad yang jelas dan adanya jaminan (*borg*) yang bernilai dari pihak *rahin* sebagai pegangan bagi *murtahin* untuk jaminan hutang. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa barang-barang yang tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan dan menurut Imam Ibnu Qudamah juga menambahkan tentang adanya unsur kepercayaan di dalam *rahn*, *marhun* yang dititipkan atas dasar kepercayaan dengan kesepakatan bersama antara *murtahin* dan *rahin*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Zamir Iqbal, Dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Ed. 1 Cet.1, h, 45.

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1.

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan diatas, mempunyai kesamaan antara satu sama lain bahwa akad dalam *rahn* harus jelas dengan adanya unsur kepercayaan dan kesepakatan antara *murtahin* dan *rahin*. Maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi *rahn* antara *murtahin* dan *rahin* dibolehkan dengan akad yang jelas, adanya nilai *marhun* yang dijamin dan atas dasar kesepakatan bersama. Dalam hal ini tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM di Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang tentang penilaian *rahin* telah tercantum pada formulir ARRUM-2, selanjutnya akad dan kesepakatan yang jelas antara *murtahin* dan *rahin* terdapat pada formulir ARRUM-3, yang menjelaskan tentang akad pembiayaan ARRUM antara pihak pegadaian dan *rahin* yang tercantum akad yang jelas dan kesepakatan bersama sehingga transaksi dalam pembiayaan ARRUM ini terhindar dari risiko dan permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, maka Penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Penilaian kelayakan terhadap nasabah digunakan Perum Pegadaian Syariah dalam memberikan pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) yaitu dengan melengkapi persyaratan pembiayaan ARRUM, melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), melakukan analisis kelayakan usaha nasabah dan menilai taksiran jaminan yang dimiliki nasabah yaitu BPKB motor/mobil. Pembiayaan ARRUM ini menggunakan akad pembiayaan *tarif ijarah* yang disesuaikan dengan harga pasar setempat. Tujuan dari penilaian kelayakan usaha *Rahin* adalah untuk menghindari pembiayaan macet dimana *Rahin* tidak mampu dalam mengembalikan hutang, untuk itulah analisis kelayakan usaha diperlukan dalam pembiayaan ini.
- b. Menurut tinjauan Ekonomi Islam Kelayakan nasabah dalam pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang terhadap nasabah, jika ditinjau menurut Ekonomi Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah yang tidak bertentangan dengan unsur yang diharamkan seperti *gharar*, *maisir* dan *riba*. Analisis kelayakan terhadap nasabah sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah tersebut layak atau tidaknya diberikan pembiayaan ARRUM sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dirugikan atas kedua belah pihak kedepannya.

## **B. SARAN**

Setelah penulis meneliti dan membahas mengenai Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang, maka ada beberapa saran yang ingin penulis berikan yaitu:

- a. Diharapkan kepada Pemerintah dan Lembaga Lainnya yang berperan didalam Pegadaian Syariah lebih memotivasi dan memberikan dukungan penuh terhadap Pegadaian Syariah, baik dalam fasilitas materil maupun non-materil sehingga Pegadaian Syari'ah bisa mewujudkan visi dan misinya untuk menjadikan Pegadaian Syariah yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat baik usaha mikro maupun usaha kecil.
- b. Diharapkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang untuk kedepannya lebih meningkatkan lagi pembiayaan ARRUM yaitu dalam segi promosi atau pengenalan produk ARRUM kepada masyarakat, karena sebagaimana yang kita ketahui di kota Bangkinang pada umumnya banyak terdapat pengusaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu, dengan

adanya pengembangan yang lebih besar terhadap produk pembiayaan ARRUM ini diharapkan pengusaha mikro dan kecil lebih meningkat dan berkembang kedepannya baik dalam segi modal dan usaha yang dijalankan.

- c. Untuk nasabah pembiayaan ARRUM diharapkan lebih memahami tentang pembiayaan ARRUM, tidak hanya melengkapi persyaratan untuk mendapat pembiayaan saja, akan tetapi lebih memahami akan tujuan dari pembiayaan ARRUM itu sendiri yaitu mewujudkan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009)
- Abdul Halim, *Analisis Kelayakan Investasi Bisnis Dari Kajian Aspek Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1.
- Abdul Rasyid Saliman, dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abu Bakar Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar: Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), Cet. ke-7.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006)
- Ahmad Abd. Madjid, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jawa Tengah: Garoeda Buana Indah, 1993), Cet. ke-4
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada group, 2010), Cet. ke-2.
- Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005)
- Depag RI, *Al-Qur'an da Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 1987)
- Divisi Usaha Syariah Perum Pegadaian, *Dokumentasi*, 2008
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Edisi 2, 2004)



Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2006), cet. ke-1.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. ke-4.

\_\_\_\_\_ *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-6.

Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 1995)

Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Tema Insani, 1999), jilid 1.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1.

Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006)

Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Kritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Sigit Triandaru, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Susanto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Veithzal Rivai, DKK, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zainuddin Ahmad Az-zubaidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari Dari Kitab At-Tajridush Shari*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra), Cet. ke-1.

Zamir Iqbal, Dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. ke-1.